

LEMBAR JAWABAN ANALISIS KASUS
--

Nomor Assessee : 15

Nama Assessee : Yudith

Tanggal : 4 Oktober 2021

Beberapa isu permasalahan kepegawaian di lingkungan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah erat kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen kepegawaian di lingkup pemerintahan itu sendiri. Salah satu isu yang sering disoroti ialah rekrutmen pegawai melalui lelang jabatan.

Lelang jabatan merupakan salah satu bagian dari rekrutmen pegawai di lingkungan pemerintahan baik pusat, provinsi, ataupun daerah. Tak pelik, lelang jabatan yang seharusnya dapat menjaring orang-orang yang berintegritas, memiliki kinerja baik, dan berdedikasi tinggi, justru terkadang dilakukan tanpa kejelasan atau transparansi dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, adanya pengaturan dalam proses rekrutmennya yang bertujuan untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Politik juga memiliki peran yang besar dalam perekrutan pegawai melalui lelang jabatan ini. Hal ini jelas merugikan pihak lain yang sudah berusaha keras dalam mengikuti proses rekrutmen dengan sejujur-jujurnya.

Melihat permasalahan yang timbul dalam proses perekrutan pegawai tersebut, transparansi maupun aturan main dalam lelang jabatan bisa ditingkatkan lagi melalui beberapa cara, yaitu hasil dari tes yang real-time dan juga penilaian etos kerja selama berkarir sebagai PNS.

Pertama, pengerjaan tes online dan real-time. Menggunakan metode ini, peserta dapat mengetahui hasil dari tes yang dilakukan saat itu juga. Dengan begitu, maka transparansi dari proses rekrutmen akan sangat terlihat jelas. Contohnya adalah ketika

peserta telah selesai mengerjakan soal, maka hasilnya bisa langsung terlihat saat peserta sudah selesai.

Kedua, penilaian etos kerja selama berkarir sebagai PNS dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat diketahui kinerja peserta proses rekrutmen pegawai, apakah kinerjanya tinggi atau rendah. Hal ini dapat menjadi patokan untuk kelulusan para peserta.

Diharapkan, dengan menggunakan dua metode ini dapat meningkatkan permasalahan rekrutmen pegawai terkait transparansi dan aturan main dalam lelang jabatan. Sehingga, intervensi politik ataupun yang lainnya juga dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.